

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Pembangunan ekonomi selalu memunculkan polemik terkait penentuan strategi dasar pembangunannya, yaitu memprioritaskan pada pertumbuhan ekonomi atau pemerataan pendapatan. Tingginya ekonomi suatu daerah memang tidak menjamin pemerataan pendapatan, namun pertumbuhan ekonomi yang cepat tetap dianggap merupakan strategi unggul dalam pembangunan ekonomi. Pembangunan memang telah menghasilkan berbagai kemajuan dalam kurun waktu yang cukup panjang, namun juga mewariskan berbagai permasalahan yang mendesak untuk ditangani, diantaranya masih terdapatnya disparitas atau ketimpangan pendapatan (Sungkar, 2021).

Negara-negara miskin dan berkembang di seluruh dunia termasuk Indonesia hingga saat ini masih menghadapi persoalan kompleks terkait dengan fenomena ketimpangan distribusi pendapatan yang terjadi. Persoalan ketimpangan pendapatan atau lebih populer disebut kesenjangan ini dalam skala yang lebih kecil juga dihadapi oleh daerah-daerah di Indonesia hingga ke tingkat kabupaten/kota. Masalah ketimpangan antar individu, antar kelompok, antar sektor maupun antar daerah perlu mendapat penanganan segera karena akan berdampak negatif terhadap stabilitas politik dan stabilitas ekonomi. Ketimpangan pasti akan selalu ada di

negara miskin, negara sedang berkembang, maupun negara maju. Setiap negara pada dasarnya tidak bisa menghilangkannya, namun hanya bisa menekan nilai ketimpangan serendah mungkin (Supriyatno, 2007).

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari berbagai provinsi dengan karakteristik perekonomian yang berbeda di setiap wilayahnya. Pasca pandemi covid-19 kemarin, Indonesia berhasil bangkit dari keterpurukan perekonomian, tiga tahun terakhir ini perekonomian Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan. Hal tersebut bisa dilihat juga pertumbuhan perekonomian di setiap provinsinya yang semakin meningkat. Akan tetapi, peningkatan tersebut tidak menjamin pemerataan di setiap provinsinya yang menyebabkan terjadinya ketimpangan.

Kemajuan perekonomian suatu wilayah merupakan salah satu indikator yang menunjukkan bahwa wilayah tersebut tidak mengalami ketimpangan. Ketimpangan pendapatan menjadi isu yang penting bagi negara Indonesia. Ketimpangan pendapatan ini berkaitan dengan distribusi pendapatan yang diterima oleh masyarakat. Semakin tinggi ketimpangan pendapatan, maka pendapatan di masyarakat pun semakin tidak merata. Kondisi seperti ini akan menyebabkan semakin besarnya kesenjangan di masyarakat dengan ekonomi relatif baik (kelompok kaya) dengan dengan mereka yang berpendapatan rendah (kelompok miskin).

Masalah ketimpangan pendapatan telah lama menjadi persoalan yang rumit dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan oleh sejumlah

negara-negara miskin atau negara berkembang, termasuk di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki nilai ketimpangan pendapatan yang cukup tinggi. Sebagian besar permasalahan ketimpangan pendapatan di Indonesia disebabkan karena kurangnya pendapatan yang diterima dalam memenuhi kebutuhan hidup, dan ketimpangan ini juga disebabkan karena tidak meratanya pembangunan ekonomi di setiap provinsinya.

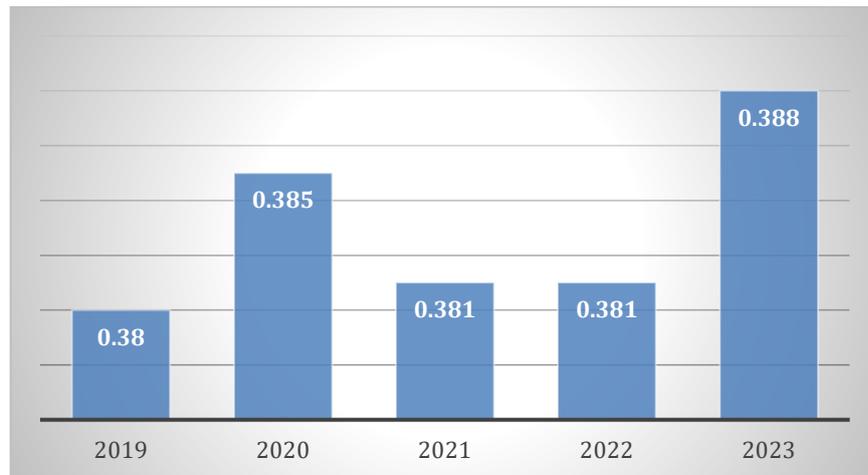
Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan jumlah penduduk paling padat no empat di dunia. Jumlah penduduk Indonesia setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kenaikan jumlah penduduk setiap tahunnya memberikan dampak tersendiri bagi perekonomian Indonesia, baik itu dampak yang positif maupun negatif. Pada kenyataannya peningkatan jumlah penduduk di Indonesia tidak dibarengi dengan peningkatan jumlah tenaga kerja. Ketersediaan kesempatan kerja lebih kecil rasionya apabila dibandingkan dengan peningkatan jumlah penduduk, hal itu yang menyebabkan terjadinya kesenjangan di masyarakat dengan meningkatnya pengangguran dan kemiskinan yang pada akhirnya distribusi pendapatan di Indonesia tidak merata yang menjadi penyebab terjadinya ketimpangan pendapatan.

Ketimpangan pasti akan selalu ada baik di negara berkembang bahkan di negara maju sekalipun. Perbedaannya dapat dilihat dari proporsi atau besar kecilnya tingkat ketimpangan yang terjadi, serta tingkat kesulitan dalam mengatasinya. Sejak dahulu sudah diupayakan untuk memusnahkan ketimpangan pendapatan ini, akan tetapi pada kenyataannya ketimpangan pendapatan ini tidak dapat dimusnahkan,

namun hanya bisa dikurangi pada suatu tingkat sistem sosial tertentu agar terjadinya keselarasan dalam proses pertumbuhan.

Meskipun realisasi pemulihan ekonomi pasca pandemi sudah berjalan hampir empat tahun dan mengalami peningkatan, hal ini belum membuat perubahan yang signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan antar provinsi di Indonesia. Pandemi covid-19 membuat masyarakat berusaha lebih keras dalam pemerataan pendapatan, terutama untuk membangkitkan kembali usahanya. Sebagai contoh, seseorang yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) memerlukan waktu yang lama untuk mendapatkan pekerjaan kembali atau menggunakan pilihan lain seperti berwirausaha. Hal tersebut yang menyebabkan kondisi distribusi pendapatan di Indonesia masih timpang dan selalu berfluktuasi (Chayyani, 2021).

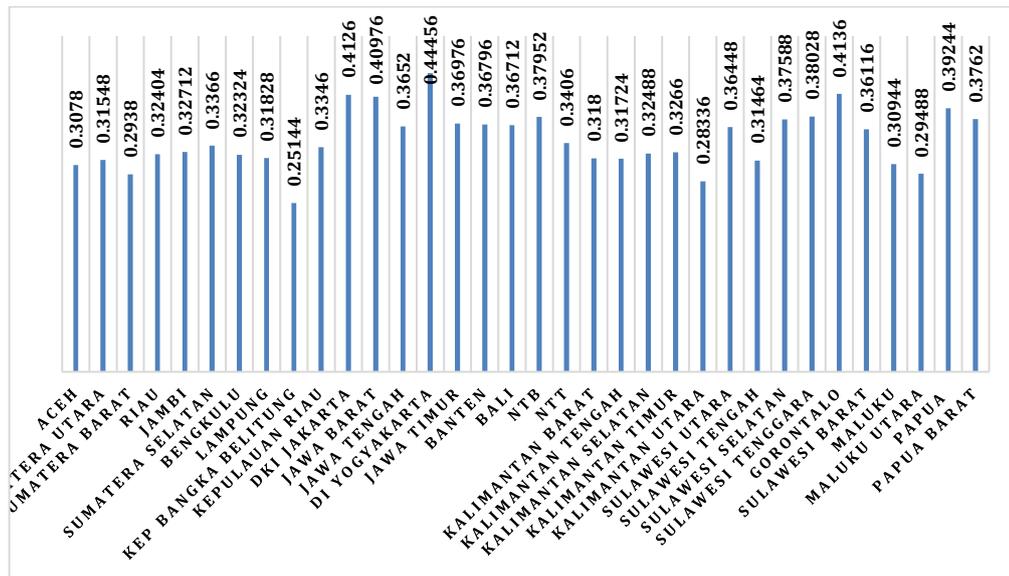
Ketimpangan pendapatan di Indonesia dapat dilihat melalui index gini ratio. Index gini merupakan salah satu ukuran ketimpangan dengan mengukur nilai koefisien gini. Apabila nilai koefisien gini semakin tinggi, maka semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pendapatan, sebaliknya apabila nilai koefisien gini rendah maka semakin rendah juga tingkat ketimpangan pendapatan. Indikator yang digunakan untuk mengukur ketimpangan adalah rasio gini yang berkisar antara nol sampai satu. Ketika koefisien gini nilainya nol maka dapat dikatakan tidak terdapat ketimpangan atau pemerataan sempurna. Sebaliknya apabila koefisien gini bernilai satu maka dapat dikatakan adanya ketimpangan.



**Gambar 1ta.1 Gini Ratio Indonesia Tahun 2019-2023**

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

Gambar di atas merupakan data ketimpangan pendapatan di Indonesia tahun 2019 sampai 2023. Dapat dilihat bahwa nilai gini ratio Indonesia pada tahun 2019 sampai 2023 sangat berfluktuasi setiap tahunnya. Nilai rasio gini pada tahun 2019 yaitu sebesar 0,38 dan mengalami kenaikan pada tahun 2020 sebesar 0,385, hal tersebut dapat dijelaskan karena pada tahun 2020 merupakan tahun di mana terjadinya krisis ekonomi global yang di akibatkan oleh pandemi covid-19 yang melesukan perekonomian negara di seluruh dunia termasuk Indonesia. Pada tahun 2021 dan 2022 nilai gini ratio menurun bahkan nilainya seimbang yaitu di rasio 0,381, dan pada tahun 2023 mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu melonjak menjadi 0,388.



**Gambar 1 2 Rata-rata Gini ratio Tahun 2018-2023 di 34 Provinsi di Indonesia**

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat rata-rata 5 tahun terakhir rasio gini antar provinsi di Indonesia sangat berfluktuasi. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi ketimpangan pendapatan antar provinsi di Indonesia tidak merata atau dengan kata lain kesejahteraannya masih belum terdistribusi dengan baik. Tingkat ketimpangan pendapatan yang bervariasi tiap provinsinya bisa disebabkan karena perbedaan perekonomian di setiap provinsi, seperti belum meratanya pembangunan di setiap provinsi yang menyebabkan ketimpangan itu terjadi. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan provinsi yang ketimpangan pendapatannya paling rendah, yaitu hanya sebesar 0,251. Bahkan apabila dibandingkan dengan nilai gini ratio nasional nilainya sangat berbeda jauh, rasio gini nasional lebih timpang dibandingkan dengan rasio gini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Yang dapat diartikan bahwa distribusi pendapatan di Provinsi

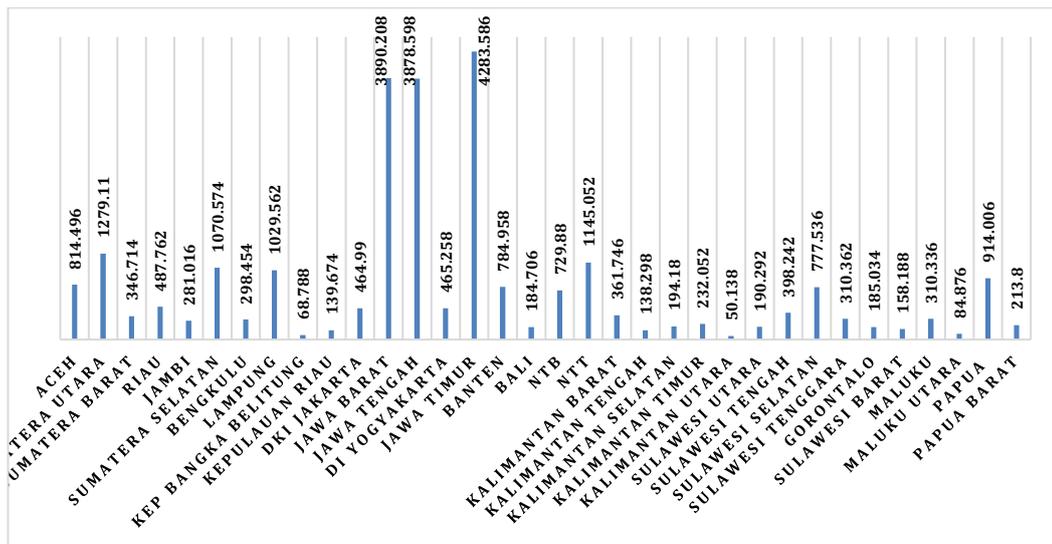
Kepulauan Bangka Belitung lebih merata apabila dibandingkan dengan tingkat nasional.

Rendahnya nilai gini ratio di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disebabkan karena beberapa faktor diantaranya pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, populasi manusia yang tergolong rendah, infrastruktur pendidikan yang memadai, Indeks pembangunan yang tergolong tinggi, tingkat kemiskinan yang rendah, dan sektor ekonomi yang banyak menyerap tenaga kerja masyarakat lokal seperti lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan (BPS Kepulauan Bangka Belitung, 2024).

Tingkat ketimpangan pendapatan yang paling tinggi yaitu Provinsi D.I Yogyakarta dengan nilai rata-rata rasio gini sebesar 0,444. Bahkan nilai rasio gini D.I Yogyakarta jauh lebih tinggi daripada rasio gini nasional. Yang dapat diartikan bahwa ketimpangan di D.I Yogyakarta lebih tidak merata pendapatannya apabila dibandingkan dengan ketimpangan di tingkat nasional. Padahal Provinsi D.I Yogyakarta merupakan wilayah yang dikenal dengan kota pelajar, dan memiliki destinasi wisata yang cukup baik untuk pemasukan pendapatan daerahnya, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) termasuk golongan tertinggi di Indonesia.

Menurut Ketua Dewan Pengurus Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3S), Didik Junaedi Rachbini beberapa hal yang menyebabkan terjadinya ketimpangan pendapatan di Provinsi D.I Yogyakarta adalah pertumbuhan ekonomi yang pesat di sektor pariwisata dan pendidikan. Pesatnya pertumbuhan ekonomi di sektor pendidikan dan pariwisata menyebabkan

peningkatan pendapatan kelas menengah dan kelas atas. Akan tetapi, kelas bawah tidak terpengaruh oleh pertumbuhan ekonomi (Alfadillah, 2022) . Dengan kata lain, distribusi pendapatan di Indonesia ini bisa dikatakan buruk, ketidakmerataan distribusi pendapatan akan menghambat tumbuhkan perekonomian nasional.



**Gambar 1 3 Rata-rata Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2019-2023 di 34 Provinsi di Indonesia (Ribu Jiwa)**

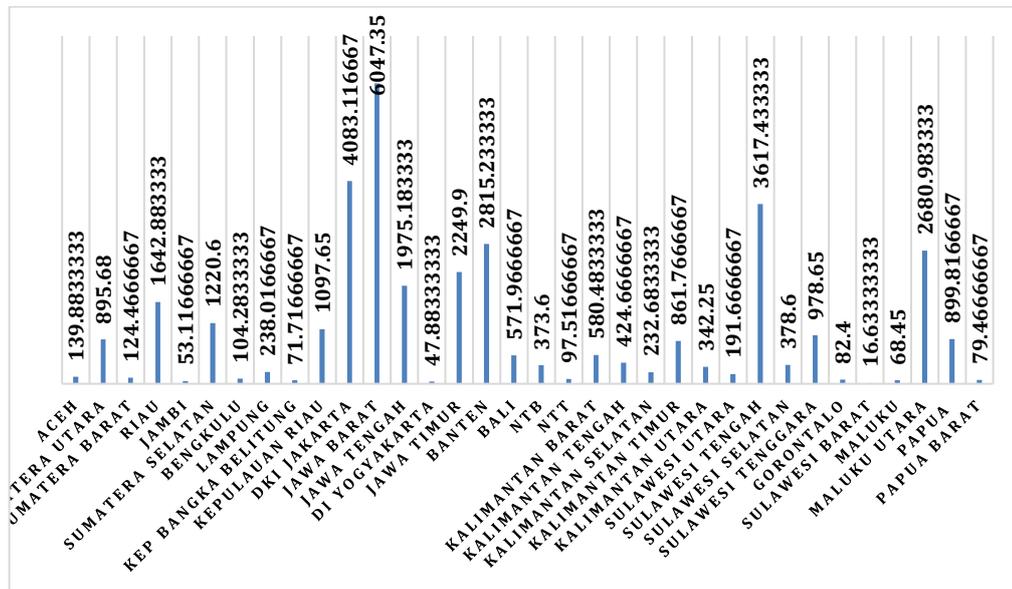
Sumber: Data Pusat Statistik (data diolah)

Kemiskinan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan. Berdasarkan gambar diatas, rata-rata jumlah penduduk miskin dalam 5 tahun terakhir di 34 provinsi di Indonesia, sangat timpang di setiap provinsinya. Salah satu provinsi dengan jumlah penduduk miskin terendah yaitu Jawa Timur, yaitu dengan rata-rata penduduk miskin sebesar 4.283.586 jiwa. Gubernur Jawa Timur menjelaskan bahwa salah satu aspek utama yang menyebabkan peningkatan tingkat kemiskinan di Jawa Timur adalah dikarenakan kebijakan harga BBM yang memicu kenaikan tingkat inflasi secara keseluruhan pada tahun 2022 lalu, dan

masyarakatnya yang belum tepat dalam mengalokasikan pendapatannya (Kusuma & Zakiyyah, 2024). Lalu disusul oleh provinsi Jawa Barat dengan jumlah penduduk miskin sebesar 3.890.208 jiwa dan Provinsi Jawa Tengah sebesar 3878.598 jiwa. Dan untuk provinsi yang memiliki penduduk miskin terendah yaitu Kalimantan Utara yang hanya berjumlah 50.138 jiwa, disusul Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 68.788 jiwa, dan Maluku Utara sebesar 84.876 jiwa.

Angka penduduk miskin di setiap provinsi yang cenderung fluktuasi di setiap provinsinya disebabkan karena kompleksitas sosio-ekonomi yang berbeda-beda di setiap provinsinya. Perbedaan ini mencakup variasi dalam pertumbuhan ekonomi, akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, struktur industri dan efektivitas program kebijakan ekonomi oleh pemerintah setempat yang cenderung berbeda-beda.

Penelitian yang telah diteliti oleh (Kunenengan & Engka , 2023) dengan judul penelitian “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Lima Kabupaten/Kota Di Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara” yang menyatakan bahwa hasil penelitian menunjukkan kemiskinan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Sulawesi Utara. Sedangkan hasil penelitian yang telah diteliti oleh (Ariadi & Muzdalifah, 2020) dengan judul penelitian “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Dan Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Kalimantan Selatan” yang menyatakan bahwa hasil penelitian menunjukkan kemiskinan secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Selatan.



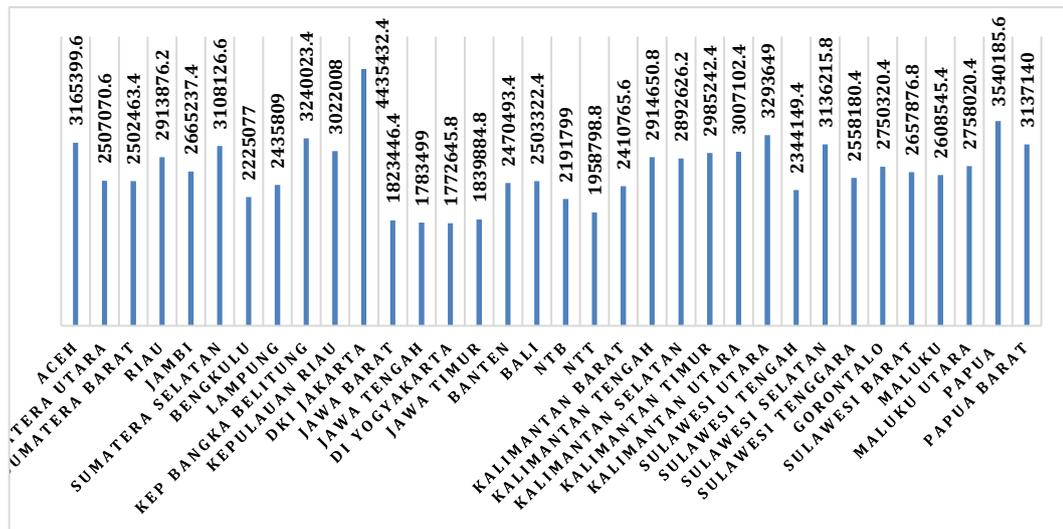
**Gambar 1 4 Rata-rata Penanaman Modal Asing Tahun 2019-2023 di 34 Provinsi di Indonesia (Dalam Juta US\$)**

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

Faktor lain yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan yaitu penanaman modal asing. Gambar di atas merupakan rata-rata penanaman modal asing 5 tahun terakhir di 34 Provinsi di Indonesia. Dapat dilihat dari data di atas bahwa provinsi Jawa Barat memiliki nilai penanaman modal asing paling tinggi di Indonesia yakni sebesar 6047,35 juta US dollar, Adapun faktor yang menyebabkan tingginya minat investasi di Jawa Barat, menurut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dikarenakan oleh 3 hal. Pertama, kondisi infrastruktur di Jawa Barat yang memadai. Kedua, sumber daya manusia yang paling produktif se-Indonesia. Ketiga, mudahnya mengurus perizinan, terutama di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (Zakariya, 2023).

Penelitian yang telah diteliti oleh (Karimi, Mulyani, Murialti, & Tibrani, 2023) dengan judul penelitian “Pengaruh Penanaman Modal Asing, Indeks Persepsi

Korupsi, Kemiskinan, Pengangguran Dan Upah Minimum Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia” yang menyatakan bahwa hasil penelitian menunjukkan penanaman modal asing secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Sedangkan penelitian yang telah diteliti oleh (Jannah, 2022) dengan judul penelitian “Analisis Pengaruh Tingkat PDRB Perkapita, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Penanaman Modal Asing Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia Periode Tahun 2019-2021” yang menyatakan bahwa hasil penelitian menunjukkan penanaman modal asing secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia.



**Gambar 1 5 Rata-Rata Upah Minimum Provinsi Tahun 2019-2023 di 34 Provinsi di Indonesia (Dalam Juta Rupiah)**

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

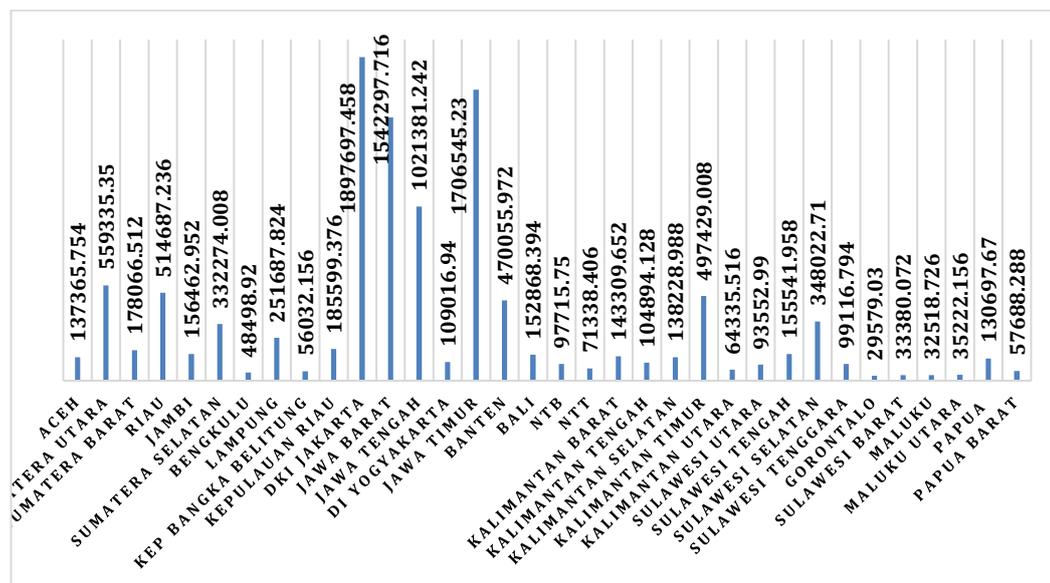
Selain itu, faktor lain yang dapat mempengaruhi ketimpangan pendapatan yaitu Upah Minimum Provinsi, yang mana upah minimum merupakan dasar

kehidupan layak. Gambar di atas menunjukkan nilai rata-rata upah minimum provinsi 5 tahun terakhir di 34 Provinsi di Indonesia. Dari data tersebut terlihat begitu timpang nilai UMP di setiap Provinsinya. Provinsi yang menduduki nilai tertinggi yaitu DKI Jakarta yaitu dengan nilai rata-rata UMPnya sebesar Rp.4.435.432, bahkan pada tahun 2023 UMP DKI Jakarta hampir mencapai angka 5 juta rupiah, hal tersebut dikarenakan DKI Jakarta merupakan Ibu kota negara Indonesia sekaligus tingkat mobilitas perekonomiannya yang tinggi. Sedangkan nilai UMP terendah yaitu D.I Yogyakarta, karena biaya hidup di D.I Yogyakarta relatif lebih rendah dibandingkan provinsi lain, dengan begitu pemerintah menetapkan upah sesuai dengan standar hidup lokal. Akan tetapi apabila melihat rasio gini pada gambar 1.2 diatas, tingginya upah minimum Provinsi DKI Jakarta tidak dibarengi dengan pemerataan pendapatan.

Penelitian yang telah diteliti oleh (Sungkar, Nazamuddin, & Nasir, 2015) dengan judul penelitian “Pengaruh Upah Minimum Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia” yang menyatakan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa upah minimum secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Sedangkan penelitian yang telah diteliti oleh (Anshari, Azhar, & Ariusni, Analisis Pengaruh Pendidikan, Upah Minimum Provinsi, dan Belanja Modal Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Seluruh Provinsi di Indonesia, 2018) dengan judul penelitian “Analisis Pengaruh Pendidikan, Upah Minimum Provinsi, dan Belanja Modal Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Seluruh Provinsi di Indonesia” yang menyatakan bahwa hasil

penelitian menunjukkan bahwa upah minimum secara parsial berpengaruh negative dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di seluruh Provinsi di Indonesia.

Faktor lain yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB yang tinggi menunjukkan suatu wilayah telah berhasil mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya, dengan begitu akan berimplikasi pada distribusi pendapatan wilayah tersebut, terdapat keterkaitan yang erat antara PDRB dengan ketimpangan pendapatan.



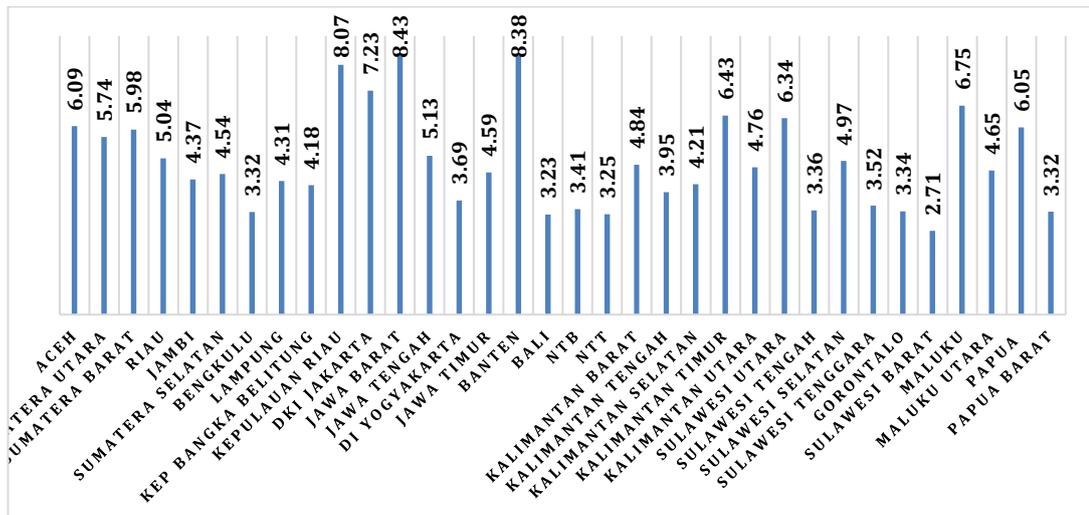
**Gambar 1 6 Rata-rata PDRB 34 Provinsi di Indonesia tahun 2018-2023 (Dalam Milyar rupiah)**

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Gambar di atas menunjukkan nilai rata-rata PDRB tahun 5 tahun terakhir di 34 provinsi di 34 provinsi di Indonesia. Dari data PDRB tersebut dapat dilihat bahwa nilai PDRB antar provinsi di Indonesia begitu timpang. Provinsi yang menduduki nilai rata-rata PDRB tertinggi yaitu DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa

Barat. Provinsi DKI Jakarta berkontribusi terhadap PDB nasional sebesar 16,77%, yaitu dengan total PDRB pada tahun 2023 sebesar 2050,47 triliun rupiah, yang menunjukkan bahwa Provinsi tersebut menunjukkan dominasi ekonomi yang kuat. Sedangkan Provinsi dengan nilai PDRB terendah yaitu Provinsi Gorontalo 29579,03 milyar rupiah. Akan tetapi apabila melihat data pada gambar 1.2 di atas, tingginya nilai PDRB di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat tidak diikuti dengan rendahnya nilai ketimpangan pendapatan.

Penelitian yang telah diteliti oleh (Kusuma D. S., 2019) dengan judul penelitian “Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Inflasi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2017” yang menyatakan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial PDRB memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di D.I Yogyakarta. Sedangkan penelitian yang telah diteliti oleh (Prastiwi, Laut, & Destiningsih, 2020) dengan judul penelitian “Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan Di Pulau Jawa Tahun 2014-2018” yang menyatakan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial PDRB memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di pulau Jawa.



**Gambar 1 7 Rata-rata Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2019-2023 Di 34 Provinsi di Indonesia**

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

Tingkat pengangguran terbuka menjadi faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan. Gambar di atas menunjukkan rata-rata tingkat pengangguran terbuka 5 tahun terakhir di 34 Provinsi di Indonesia. Dari data tersebut tingkat pengangguran tertinggi yaitu provinsi Jawa Barat. Penyebab tingginya pengangguran di Jawa Barat diantaranya belum maksimalnya pertumbuhan ekonomi dalam mengakselerasi pertumbuhan kesempatan kerja, masih rendahnya indeks Pendidikan dan konsumsi perkapita serta laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi menyebabkan daya saing tenaga kerja menjadi penyebab tingginya pengangguran di Jawa barat (Adipratomo, Hutagaol, & Tanjung, 2024).

Penelitian yang telah diteliti oleh (Vionita & Artha, 2024) dengan judul penelitian “Analisis Faktor-Faktor Ketimpangan Pendapatan di Pulau Jawa” yang menyatakan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial tingkat

pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di pulau Jawa. Sedangkan penelitian yang telah diteliti oleh (Ersad, Amir, & Zulgani, 2022) dengan judul penelitian “Dampak IPM, Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Sumatera Bagian Selatan” yang menyatakan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Sumatera Selatan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka ada beberapa alasan yang mendasari penelitian ini. Pertama, masalah ketimpangan di Indonesia masih belum stabil, cenderung meningkat setiap tahunnya, dan dari 34 provinsi di Indonesia memiliki ketimpangan pendapatan yang sangat timpang di setiap Provinsinya. Kedua, variabel kemiskinan, penanaman modal asing, upah minimum, PDRB, dan tingkat pengangguran terbuka mempunyai pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Dan ketiga apabila kelima variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat memberikan pengaruh untuk menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan, maka dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan oleh pemerintah. Dari permasalahan yang telah diuraikan, penulis tertarik mengangkat topik dalam penelitian ini dengan judul **“ANALISIS DETERMINAN KETIMPANGAN PENDAPATAN DI 34 PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2018-2023”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka dapat diidentifikasi permasalahannya, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh kemiskinan, penanaman modal asing, upah minimum provinsi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan tingkat pengangguran terbuka secara parsial terhadap ketimpangan pendapatan di 34 Provinsi di Indonesia tahun 2018-2023?
2. Bagaimana pengaruh kemiskinan, penanaman modal asing, , upah minimum provinsi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan tingkat pengangguran terbuka secara simultan terhadap ketimpangan pendapatan di 34 Provinsi di Indonesia tahun 2018-2023?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah, maka penulis memiliki tujuan yang akan dicapai, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kemiskinan, penanaman modal asing, , upah minimum provinsi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan tingkat pengangguran terbuka secara parsial terhadap ketimpangan pendapatan di 34 Provinsi di Indonesia tahun 2018-2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh kemiskinan, penanaman modal asing, , upah minimum provinsi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan tingkat pengangguran terbuka secara simultan terhadap ketimpangan pendapatan di 34 Provinsi di Indonesia tahun 2018-2023.

## **1.4 Kegunaan Hasil Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi semua pihak. Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

### **1.4.1 Bagi akademisi, peneliti, dan pemerintah**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan akademis ilmu ekonomi Pembangunan khususnya perihal korelasi antara kemiskinan, penanaman modal asing, upah minimum Provinsi, PDRB, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan pendapatan. Selanjutnya bagi peneliti dan masyarakat diharapkan dapat memberikan manfaat dan menjadi wawasan baru.

### **1.4.2 Bagi pemerintah dan instansi terkait**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintahan untuk dapat lebih mempertimbangkan kembali langkah yang akan diambil dalam penerapan kebijakan untuk meminimalisir ketimpangan pendapatan dan memperhatikan beberapa komponen kemiskinan, penanaman modal asing upah minimum, PDRB, dan tingkat pengangguran terbuka.

## **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **1.5.1 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di 34 Provinsi di Indonesia dengan pengambilan data dari website Badan Pusat Statistik (BPS), karena website tersebut menyajikan data-data yang valid untuk menunjang usulan penelitian ini.

